

BIBLIOGRAPHY

BUKU

- Arikunto, (2002), *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, Jakarta, PT Gramedia Indonesia.
- Muhaimin, (2020), *Metode Peneliti Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,.
- Solly Lubis, (2011), *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Edisi 2, Jakarta, Cetakan I, PT. Sofmedia
- Supriyatno, Budi, (2019), *Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik*, Jakarta, CV. Media Brilian.
- Siswanto, Sunamo. (2012), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

JURNAL

- Agapa, Petrus. (2017). "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Membuat Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009 – 2014. *Jurnal Renaissance*. Volume 2 No.02. hlm. 242-253.

Aridhayandi, M. Rendi. (2018). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.4 Oktober-Desember 2018*.

Irawan Febriansah, Ferry. (2016). "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia." *Perspektif*. Volume XXI Nomor 3.

Kaisupy, Tuanaya dan Wance. (2020). "Peran Anggota Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat." *Jurnal Moderat*. Volume 6, Nomor 2.

Prasetyo, Yogi. (2020). "Transformasi Nilai Nilai Islam dalam Hukum Positif." *Al-Ahkam Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 1.

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, (2014). "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim" *Jurnal Ilmiah*, Malang, Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7

Sihombing, Eka N.A.M. (2016). "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13 Nomor 3 September 2016. 285 – 296.

PENELITIAN, TESIS

Djemari Mardapi, dkk. (1994). "Daya Prediksi Tes Masuk IKIP Jakarta terhadap Prestasi dan Lama Studi Mahasiswa Pascasarjana IKIP Yogyakarta." *Abstrak hasil Penelitian IKIP Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP

Faridah, Siti. (2020). "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam Membentuk Produk Hukum yang Berkualitas." *Skripsi Universitas Semarang*. Semarang

Indra. (2021). "Eksistensi Biro Hukum dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mardhotillah, (2015). "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*. Palembang.

Nasution, Bismar. (2017). "Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" *Abstrak Hasil Penelitian Universitas Sumatra Utara*. Medan